

PERANAN KOMITE SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DASAR DI KOTA MADIUN

Agus Budi Santoso
Sumani
FPBS IKIP PGRI Madiun

Abstract

Otonomi pendidikan sebagai bentuk desentralisasi pendidikan, melahirkan konsep penting bagi penyelenggaraan pendidikan. Salah satunya konsep penting tersebut adalah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang kemudian melahirkan Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan sebagai perwujudan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan. Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Oleh karena itu, komite sekolah sebagai unsur masyarakat yang terhimpun dalam kelembagaan pendidikan di satuan pendidikan, memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan. Mengingat pentingnya komite sekolah sebagai elemen pendidikan, maka peran dan fungsinya perlu dioptimalkan guna meningkatkan mutu pendidikan di tanah air. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara objektif peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di kota Madiun, khususnya di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dalam bentuk naturalistik dengan rancangan atau strategi penelitian studi kasus. Jenis sumber data yang digunakan adalah (1) Peristiwa, yaitu peranan komite sekolah di sekolah, (2). Informan atau nara sumber yang terdiri dari unsur komite sekolah, unsur kepala sekolah, dan unsur guru, dan (3). Arsip atau dokumen. Penelitian ini dilaksanakan di tiga sekolah yaitu SDN 01 Klegen Madiun, SDN 01 Kartoharjo Madiun, dan MI Terpadu Bhakti Ibu Madiun. Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan bulan September 2007. Pengumpulan data dilakukan dengan *observasi*, *Wawancara secara Mendalam (in-depth interviewing)* dan *Analisis Dokumen*. Untuk menganalisis data digunakan teknik analisis dengan “model analisis interaktif”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di sekolah, komite sekolah melakukan kerja sama dengan pihak sekolah dalam berbagai bentuk kerjasama serta memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil. (2) Pemberian pertimbangan kepada pihak sekolah, dilakukan komite sekolah melalui kegiatan musyawarah Pengurus Komite Sekolah. (3) Arahan dan dukungan tenaga diwujudkan dalam bentuk memberikan arahan untuk menambah tenaga pengajar maupun tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan. (4) Bantuan berupa sarana dan prasarana, dibrikan dalam bentuk perangkat komputer, kursi, kipas angin, pengadaan laboratorium komputer dan bahasa, media pembelajaran (TV, VCD, Laptop dan LCD), dan alat-alat kesenian/drumband. (5) Pemberian pertimbangan penentuan dan pelaksanaan kebijaksanaan pendidikan direalisasikan dengan peran komite dalam penentuan BOS buku, penentuan RAPBS, rapat pleno sekolah atau program kegiatan sekolah, dan penentuan usulan rehab bangunan sekolah. (6) Dukungan finansial diwujudkan dalam bentuk bantuan dana yang kemudian diwujudkan dalam bentuk peralatan media pembelajaran, peralatan komputer, peralatan drumband, peralatan sekolah yang lain. Dukungan pemikiran berupa pemberian pertimbangan, usulan dan masukan bagi peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Dukungan tenaga berupa keikutsertaan anggota komite dalam berbagai kegiatan di sekolah. (7) Peran kontrol dilakukan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan dilakukan dengan secara berkala meminta laporan pertanggungjawaban dari kegiatan pembelajaran dan pengelolaan keuangan sekolah secara rutin. (8) Peran mediator ini dijalankan dalam bentuk penyampaian berbagai program pemerintah pada rapat pleno tentang adanya dana BOS, bantuan *block grant*, dan pelaksanaan ujian nasional.

Bersasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar (1) para pengurus komite sekolah senantiasa aktif dan kreatif dalam memberdayakan sumber daya yang ada di sekolah maupun yang ada di masyarakat agar bisa membantu secara optimal peningkatan mutu pendidikan di sekolah. (2) para kepala sekolah diharapkan mampu bekerja sama dengan komite sekolah secara sinergis agar mutu pendidikan di sekolah bisa meningkat. (3) para guru senantiasa memperhatikan saran dan pertimbangan komite sekolah berkenaan dengan peningkatan kualitas pembelajaran dan sekaligus pelayanan kepada para siswa agar mutu pendidikan bisa meningkat. (4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Madiun senantiasa memberikan kontribusi kepada komite sekolah sesuai dengan kewenangannya agar komite lebih berdaya dalam mendukung program pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di tingkat pendidikan dasar.

Kata Kunci: Komite Sekolah, Peningkatan Mutu Pendidikan, Pendidikan Dasar

PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah masih rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Meskipun di sebagian sekolah, terutama di perkotaan, sudah berhasil melakukan peningkatan mutu pendidikan sehingga memberikan hasil yang sangat menggembirakan, namun sebagian besar lainnya justru masih sangat memprihatinkan.

Pemberdayaan sumber daya manusia, merupakan prasyarat mutlak yang harus dipenuhi untuk keberhasilan setiap kegiatan. Sumber daya manusia merupakan motor penggerak utama yang paling penting bagi suatu kegiatan. Oleh karena itu, berkenaan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan, khususnya di tingkat pendidikan dasar, sebenarnya berbagai upaya telah dilakukan yang salah satu diantaranya adalah yang terkait dengan kebijakan otonomi pendidikan.

Otonomi pendidikan sebagai bentuk desentralisasi pendidikan, melahirkan konsep penting bagi penyelenggaraan pendidikan. Salah satunya konsep penting tersebut adalah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang kemudian melahirkan Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan sebagai perwujudan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan.

Komite sekolah adalah unsur masyarakat yang terhimpun dalam kelembagaan pendidikan di satuan pendidikan. Peningkatan peran dan fungsi komite sekolah akan mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, dan partisipasi masyarakat yang tinggi diharapkan akan dapat mendukung kebijakan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu peran dan fungsi komite sekolah perlu diberdayakan secara lebih optimal.

Komite sekolah berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 044/U/2002, bertujuan untuk (1) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan; (2) Meningkatkan tanggung jawab dan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan (3) Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan.

Berdasarkan fenomena sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu dilakukan penelitian tentang sejauh mana peran komite sekolah dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan dasar di kota Madiun.

Permasalahan yang akan dikaji di dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. (1) Bagaimanakah peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu

pelayanan pendidikan di sekolah? (2) Bagaimanakah peran komite sekolah dalam memberikan pertimbangan kepada pihak sekolah? (3) Bagaimanakah peran komite sekolah dalam memberikan arahan dan dukungan tenaga kepada pihak sekolah? (4) Bagaimanakah peran komite sekolah dalam memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana pendidikan kepada pihak sekolah? (5) Bagaimanakah peran komite sekolah dalam memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijaksanaan pendidikan kepada pihak sekolah? (6) Bagaimanakah peran komite sekolah dalam memberikan dukungan baik berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan kepada pihak sekolah? (7) Bagaimanakah komite sekolah memberikan kontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan kepada pihak sekolah? (8) Bagaimanakah komite sekolah menjalankan perannya sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat?. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara objektif peran serta komite sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di kota Madiun khususnya di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah kota Madiun. Secara lebih khusus, penelitian ini berusaha memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan berkenaan dengan peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah kota madiun pada Tahun Pelajaran 2007-2008, sebagaimana yang telah dikemukakan di dalam rumusan masalah di atas.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan bentuk alternatif sekolah dalam program desentralisasi bidang pendidikan yang ditandai adanya otonomi luas di tingkat sekolah, partisipasi masyarakat yang tinggi, dan dalam kerangka kebijaksanaan pendidikan nasional. Berkenaan dengan otonomi, Tilaar (2000: 102-103) menjelaskan bahwa otonomi pada hakikatnya bertujuan untuk memandirikan seseorang atau suatu lembaga atau suatu daerah. Lembaga-lembaga tersebut harus mampu mengurus dirinya sendiri. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan kemandirian tersebut diperlukan usaha pemberdayaan. Selain itu dijelaskan pula bahwa ada empat unsur inti yang harus diberdayakan agar lembaga pendidikan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Empat unsur inti yang berperan dalam proses pemberdayaan tersebut adalah (1) masyarakat lokal; (2) lembaga tinggi di daerah; (3) lembaga pemerintahan di daerah; dan (4) lembaga pendidikan.

Otonomi pendidikan diberikan agar sekolah dapat leluasa mengelola sumber daya dengan mengalokasikannya sesuai prioritas kebutuhan serta tanggap terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Sementara itu, masyarakat juga diharapkan dapat berpartisipasi di dalam memahami, membantu, serta mengontrol pengelolaan pendidikan. Dalam konsep ini, sekolah dituntut memiliki tanggung jawab yang tinggi, baik kepada orang tua, masyarakat, maupun pemerintah. Pemberian wewenang (otonomi) kepada sekolah, diharapkan dapat mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif.

Depdikbud (1998) dalam *Education in Indonesia: From Crisis to Recovery* merekomendasikan perlunya otonomi yang lebih besar kepada sekolah yang disertai manajemen sekolah yang bertanggung jawab. Pemberian otonomi kepada sekolah merupakan suatu bentuk kebijakan desentralisasi pendidikan (dalam Mulyasa, 2002).

Lebih lanjut menurut Mungin Eddy Wibowo (dalam Agus Budi Santoso, 2004: 38) desentralisasi pendidikan akan membuka alternatif baru yang melahirkan beberapa konsep penting dalam penyelenggaraan pendidikan, di antaranya Manajemen Berbasis Sekolah (*School-Based Management*), Pendidikan Berbasis Masyarakat (*Community-Based Education*), dan Otonomi Perguruan Tinggi.

Otonomi pendidikan diwujudkan dalam bentuk Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang dilaksanakan agar sekolah dapat leluasa mengelola sumber daya sesuai dengan prioritas kebutuhan dan tanggap terhadap kebutuhan setempat. Konsep MBS mengandaikan pemberian otonomi yang luas kepada sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan. Dalam hal ini sekolah wajib melibatkan peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, dengan tetap mengacu kepada kerangka kebijakan nasional. Kaidah efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi pegangan penting dalam penyelenggaraan MBS. Sejalan dengan hal tersebut maka di

tingkat satuan pendidikan (sekolah) dibentuk suatu komite yang disebut Komite Sekolah atau Dewan Sekolah, sedangkan di tingkat kabupaten/ kota dibentuk Dewan Pendidikan.

Tujuan utama Manajemen Berbasis Sekolah adalah peningkatan mutu pendidikan. Dengan adanya MBS sekolah dan masyarakat tidak perlu lagi menunggu perintah dari atas. Mereka dapat mengembangkan suatu visi pendidikan yang sesuai dengan keadaan setempat dan melaksanakan visi tersebut secara mandiri (diakses dari <http://mbeproject.net/introduction.html> on-line 10 Februari 2005).

MBS perlu ditunjang dengan dana operasional sekolah, agar rencana yang dibuat oleh sekolah dan masyarakat dapat dilaksanakan. Saat ini dana yang diterima sekolah dari APBD pada umumnya sangat minim. Sekolah lebih banyak menerima dana dari Komite Sekolah. Jumlah dana dari APBD yang diberikan kepada sekolah secara langsung sangat perlu ditingkatkan (diakses dari <http://mbeproject.net/mbs.html> on-line 10 Februari 2005).

Partisipasi masyarakat merupakan ikut sertanya orang lain dalam perencanaan, pelaksanaan program, memperoleh kemanfaatan dan mengevaluasi program. Partisipasi berarti pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, ketrampilan, bahan, dan jasa (Abbas, 2001). Partisipasi merupakan turut berperan sertanya di suatu kegiatan, secara mental maupun emosional untuk memberikan sumbangan pada proses pembuatan keputusan mengenai sesuatu hal dan keterlibatan untuk melaksanakan tanggung jawab (Draha, 1990).

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (2003) juga disebutkan bahwa partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan sangat diperlukan. Partisipasi tersebut meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Masyarakat juga dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

Terdapat beberapa alasan pentingnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang dinataranya: (1) besarnya kebutuhan sumber daya dan dana pendidikan, (2) keterbatasan pemerintah dalam menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung sistem pendidikan, (3) potensi yang cukup besar pada masyarakat, (4) perlunya secara bertahap meningkatkan kemampuan kemandirian masyarakat dan (5) karena partisipasi menjadi ukuran keberhasilan pendidikan (Sumarno, 1995).

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan sangat diperlukan. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah sangat bervariasi, dan dapat dilakukan sesuai potensi, peran dan fungsi masing-masing.

Kebijakan akan pentingnya pembangunan bidang pendidikan bagi pembangunan bangsa pada masa-masa yang akan datang akan semakin mendapat tempat dan sekarang ini ada tanda-tanda memperoleh dukungan besar dari pihak-pihak yang terkait seperti DPR, masyarakat industri, dan orang tua. Tuntutan akan pendidikan (*demand for education*) di kalangan masyarakat semakin meningkat, dan akan memberi peluang besar bagi layanan pendidikan, lebih-lebih setelah adanya kebijakan otonomi pendidikan akhir-akhir ini.

Berkenaan dengan otonomi pendidikan, Parji (2004: 18) menjelaskan bahwa otonomi pendidikan diyakini akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan, di samping memacu para pelaku pendidikan untuk meningkatkan profesionalismenya.

Peran serta komite sekolah diperlukan karena pada dasarnya pendidikan adalah tanggung jawab bersama anatar keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Keluarga bertanggung jawab untuk mendidik moralitas/agama, menyekolahkan anaknya, serta membiayai keperluan pendidikan anaknya. Masyarakat berhak dan berkewajiban untuk mendapatkan dan mendukung pendidikan yang baik. Kewajiban mereka tidak hanya dalam bentuk sumbangan dana tetapi juga ide dan gagasannya.

Pemerintah berkewajiban membuat gedung sekolah, menyediakan tenaga/ guru, melakukan standardisasi kurikulum, menjamin kualitas buku paket, alat peraga, dan sebagainya. Karena kemampuan pemerintah terbatas, maka peran serta masyarakat akan sangat diperlukan (Depdiknas, 2004).

Menurut Mungin Eddy Wibowo (dalam Agus Budi Santoso, 2004: 39) komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan (sekolah). Komite Sekolah dibentuk dengan tujuan untuk (1) mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam menyalurkan kebijaksanaan operasional dan program pendidikan di sekolah; (2) meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan di sekolah; dan (3) menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di sekolah.

Komite sekolah berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 044/U/2002, bertujuan untuk (1) mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan; (2) meningkatkan tanggung jawab dan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan (3) menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan.

Peran komite sekolah sesuai Kepmendiknas RI Nomor 044/U/2002 adalah: (1) Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, (2) Pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan, (3) Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan, (4) Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat

Adapun fungsi komite sekolah adalah: (1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, (2) Melakukan kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, (3) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat, (4) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan (5) Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan (6) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan (7) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Kualitas penyelenggaraan pendidikan ditentukan oleh banyak faktor, dalam kajian ini peran komite sekolah dan partisipasi masyarakat menjadi fokus analisis yang begitu diperlukan dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Pemberdayaan komite sekolah dilakukan untuk terwujudnya penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, berkembangnya partisipasi masyarakat yang dapat mendukung kualitas penyelenggaraan pendidikan.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan masalah penelitian sebagaimana dirumuskan di dalam bab Pendahuluan, maka metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dalam bentuk naturalistik.

Perilaku yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan dasar di sekolah dasar. Sedangkan yang dimaksud dengan konteks alamiah adalah sekolah tempat di mana kegiatan pembelajaran tersebut berlangsung

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini termasuk dalam penelitian naturalistik mikro karena hanya melibatkan satu lembaga sosial (*a single social institution*), yaitu SDN 01 Klegen Madiun, SDN 01 Kartoharjo Madiun, dan MI Terpadu Bhakti Ibu Madiun dengan karakteristik khususnya. Pemilihan lingkup penelitian yang sempit tersebut berimplikasi pada jenis teori yang dihasilkan, yaitu

teori substantif. Teori-teori yang dikembangkan digunakan untuk menjelaskan peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan dasar di sekolah dasar.

Rancangan atau strategi penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah studi kasus. Dikategorikan penelitian studi kasus karena (1) penelitian ini akan menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa; (2) permasalahan yang diteliti hanya sebagian dari keseluruhan sistem penyelenggaraan sekolah; (3) subjek penelitian hanya sebagian dari keseluruhan sistem penyelenggaraan sekolah; dan (4) lokasi penelitian hanya satu dari sejumlah sekolah yang ada dengan karakteristik yang khusus.

Permasalahan dan fokus penelitian ini sudah ditentukan terlebih dahulu sebelum peneliti terjun dan menggali permasalahan, oleh karena itu, jenis strategi penelitian kasus ini secara lebih khusus disebut sebagai studi kasus terpancang (Lincoln & Guba, 1985: 187-220; Sutopo, 1996:136; dan Yin, 2000: 1, 46-53).

Sumber Data

Sumber data di dalam penelitian kualitatif menurut Yin (2000:101), bisa berasal dari enam sumber, yaitu dokumen, rekaman arsip, wawancara, pengamatan langsung, observasi partisipan, dan perangkat-perangkat fisik. Sementara itu, Sutopo (1996: 49-51) menyebutkan bahwa data dapat digali dari: informan (narasumber), peristiwa atau aktivitas, tempat atau lokasi, dokumen dan arsip. Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) Peristiwa, yaitu peranan komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan dasar di sekolah; (2) Informan atau nara sumber yang terdiri dari unsur komite sekolah, unsur kepala sekolah, dan unsur guru; (3) Arsip atau dokumen resmi mengenai prestasi yang telah diperoleh sekolah. Sumber data dalam penelitian ini bukan sebagai yang mewakili populasinya, tetapi lebih cenderung mewakili informasinya. Datanya berupa hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 01 Klegen Madiun, SDN 01 Kartoharjo Madiun, dan MI Terpadu Bhakti Ibu Madiun dan penelitian ini dilaksanakan selama delapan bulan, yaitu pada bulan Februari sampai dengan September 2007, dengan rincian kegiatan secara garis besar meliputi kegiatan Persiapan, Pengumpulan Data, Analisis Data, dan Penyusunan Laporan. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengamatan, wawancara secara mendalam, dan analisis dokumen. Di dalam penelitian ini dipergunakan pengamatan. Pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan berperan serta secara pasif (*passive participatory observation research*). Pengamatan difokuskan pada proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan dasar di sekolah. Dalam kegiatan pengamatan tersebut peneliti membuat catatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang peranan komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan dasar di sekolah. Selain pengamatan dipergunakan pula wawancara. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara secara mendalam (*in-depth interviewing*) dan wawancara di dalam penelitian ini dilakukan dengan tidak terstruktur dengan pertanyaan yang *open-ended* (terbuka) dan bersifat lentur guna menggali pandangan subjek penelitian tentang hal-hal yang sangat bermanfaat bagi penelitian. Kelonggaran dan kelenturan wawancara ini diharapkan akan mampu menggali kejujuran informan, sehingga mampu memberikan informasi yang sebenarnya (Darmiyati Zuchdi, 1994: 2-22; Sutopo, 1996: 55-57).

Wawancara secara mendalam dilakukan di luar kelas kepada kepala sekolah, guru dan anggota komite sekolah dengan maksud untuk memperoleh informasi secara langsung. Wawancara terjadwal dilaksanakan sebanyak 4 kali untuk masing-masing subjek penelitian. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan meliputi hal-hal yang berkaitan dengan peranan komite di sekolah.

Analisis dokumen dilakukan dengan mengamati dan mempelajari Rencana Anggaran Pembelajaran Sekolah (RAPBS) yang telah disusun oleh sekolah yang diteliti. Tujuannya adalah untuk melengkapi informasi mengenai peranan komite

sekolah di sekolah yang telah diperoleh melalui pengamatan dan wawancara. Sebelum suatu informasi dijadikan data penelitian, informasi tersebut terlebih dahulu diperiksa keabsahan datanya, sehingga data yang diperoleh benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sebagai titik tolak untuk menarik kesimpulan. Teknik yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini adalah perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, dan pengecekan anggota.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis “*constant comparative method*” yang dikembangkan dengan model interaktif. *Constant comparative method* meliputi empat tahap kegiatan, yaitu: (a) memperbandingkan kejadian-kejadian yang dapat diterima untuk masing-masing kategori, (b) menggabungkan kategori dan sifatnya, (c) membatasi teori, dan (d) menuliskan teori. Model interaktif meliputi tiga komponen utama, yaitu (1) reduksi data, (2) sajian data, (3) penarikan simpulan/ verifikasi.

Pengambilan simpulan atau verifikasi dimulai dari simpulan sementara. Pelaksanaan pengambilan simpulan sementara dilakukan dengan cara menelusuri kembali data yang tersaji. Gerak pengulangan dilakukan dengan cepat, karena kemungkinan munculnya pemikiran baru yang melintas pada saat menulis dan melihat kembali data-data yang tersaji dapat terjadi. Verifikasi akhir dilakukan dengan cara berdiskusi lebih teliti dengan nara sumber/ informan. Beragamnya alur verifikasi dimaksudkan agar makna data dapat teruji validitasnya, sehingga simpulan penelitian menjadi lebih kokoh dan bermakna.

Untuk menganalisis data yang diperoleh dari penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis model “analisis interaktif” (Miles & Huberman dalam Sutopo, 2002: 95). Komponen utama proses analisis model analisis interaktif ialah (1) reduksi data, (2) sajian data, dan (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Rangkaian aktivitas yang dilakukan dalam proses analisis interaktif berbentuk interaksi antar komponen dengan pengumpulan data sebagai sebuah proses siklus. Dalam proses ini posisi peneliti berada di antara komponen analisis dan pengumpulan data selama proses pengumpulan data masih berlangsung. Selanjutnya peneliti mengkonsentrasikan aktivitasnya pada ketiga komponen analisis tersebut setelah proses pengumpulan data selesai.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Deskripsi tentang peranan komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan dasar di SDN 01 Klegen, SDN 01 Kartoharjo, dan MI Terpadu Bakti Ibu Kota Madiun di dalam penelitian ini meliputi delapan pokok permasalahan sebagai berikut.

Peranan Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Pendidikan di Sekolah

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di sekolah, komite sekolah menjalankan perannya dengan melakukan kerja sama dengan pihak sekolah. Bentuk kerja sama yang diberikan komite sekolah adalah dengan memberikan dukungan dalam penyusunan program dan sekaligus upaya merealisasikannya kepada sekolah. Program kerja sekolah disusun secara bersama-sama antara kepala sekolah, dewan guru (seluruh guru) dan komite sekolah. Di dalam menjalankan perannya, komite sekolah senantiasa memberikan perhatian terhadap kondisi dan kebutuhan sekolah. Komite senantiasa memberikan dukungan moril kepada kepala sekolah dan guru agar senantiasa bersemangat di dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada anak didik maupun kepada wali murid beserta komponen sekolah yang lainnya. Dalam hal ini komite menunjukkan kepada komponen sekolah bahwa semua komponen memiliki tanggung jawab yang sama dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di sekolah.

Bentuk dukungan lain yang diberikan komite sekolah adalah dengan memberikan usulan dan saran (dalam bentuk pemikiran) tentang bagaimana memberikan pelayanan yang baik.

Peranan Komite Sekolah dalam Memberikan Pertimbangan kepada Pihak Sekolah

Dalam rangka memberikan pertimbangan kepada pihak sekolah, komite sekolah melaksanakan dengan cara bermusyawarah atau dalam bentuk rapat-rapat yang membahas semua permasalahan yang muncul di sekolah. Secara rutin, pihak komite sekolah memberikan pertimbangan ini dalam bentuk Rapat Pengurus Komite Sekolah pada saat menyusun program sekolah atau RAPBS, atau Rapat Pleno Komite Sekolah. Pertimbangan juga diberikan kepada pihak sekolah ketika sekolah mendapat bantuan *block grant* pengadaan perpustakaan sekolah untuk peningkatan status sekolah berstandar Nasional. Oleh karena jumlah bantuan yang diberikan sangat minim jumlahnya, kepala sekolah membicarakan dengan komite sekolah untuk memecahkan permasalahan tersebut.

Komite sekolah memberikan pertimbangan kepada pihak sekolah mengenai perlunya dana pendamping bantuan *block grant* yang diberikan oleh pemerintah. Pemberian pertimbangan tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya memenuhi kebutuhan sekolah untuk meningkatkan status sekolah menjadi sekolah berstandar nasional.

Komite sekolah juga memberikan pertimbangan kepada pihak sekolah (kepala sekolah dan semua guru) tentang peningkatan mutu pendidikan terutama proses belajar-mengajar kepada siswa, peran serta sekolah dalam mengikuti berbagai lomba mata pelajaran, baik di tingkat kota maupun propinsi. Pemberian pertimbangan kepada sekolah ini antara lain dalam rangka penyusunan program sekolah dan RAPBS, BOS buku dan rehab gedung sekolah, pengadaan media pendidikan, program kegiatan sekolah, dan pengadaan alat dan pakaian drumband.

Peranan Komite Sekolah dalam Memberikan Arahan dan Dukungan Tenaga kepada Pihak Sekolah

Dalam rangka memberikan arahan dan dukungan tenaga kepada pihak sekolah, komite sekolah mengarahkan kepada sekolah untuk menambah tenaga kependidikan sesuai yang diperlukan. Pemberian arahan ini dilakukan oleh komite sekolah pada saat melakukan rapat bersama guru dan kepala sekolah untuk membahas secara khusus mengenai program sekolah dan RAPBS. Dalam memberikan arahan kepada sekolah ini komite sekolah memnita kepada sekolah untuk menyampaikan program-programnya. Arahan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah dalam hal ini kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang mutu pendidikan di sekolah, seperti pengadaan tenaga pengajar komputer, tenaga pengajar melukis, tenaga pengajar menari, tenaga pengajar musik, tenaga pelatih drumband, dan lain-lain.

Peranan Komite Sekolah dalam Memberikan Bantuan Berupa Sarana dan Prasarana kepada Pihak Sekolah

Dalam rangka memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana kepada pihak sekolah, pengurus komite sekolah bermusyawarah dengan seluruh anggota komite sekolah melalui Rapat Pleno Komite Sekolah untuk memberikan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan sekolah. Pengadaan sarana dan prasarana yang diberikan kepada sekolah berupa barang. Pengadaan sepenuhnya dilakukan oleh Pengurus Komite Sekolah yang ditunjuk dalam rapat.

Secara konkret, pemberian bantuan sarana dan prasarana ini berupa bantuan komputer, kursi, kipas angin, pengadaan laboratorium komputer dan bahasa, pengadaan media pembelajaran (TV, VCD, Laptop dan LCD), dan pengadaan alat-alat drumband.

Peranan Komite Sekolah dalam Memberikan Pertimbangan dalam Penentuan dan Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan kepada Pihak Sekolah

Dalam memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan kepada pihak sekolah, keomite sekolah melakukan dengan cara melalui rapat pengurus komite sekolah dengan guru dan melalui rapat pleno dengan anggota komite.

Peran komite sekolah dalam memberikan pertimbangan penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan kepada pihak sekolah adalah dalam hal penentuan BOS buku, penentuan RAPBS, penentuan RAPBS, rapat pleno sekolah atau program kegiatan sekolah, dan penentuan usulan rehab bangunan sekolah.

Peranan Komite Sekolah dalam Memberikan Dukungan baik Berwujud Finansial, Pemikiran maupun Tenaga dalam Penyelenggaraan Pendidikan kepada Pihak Sekolah

Dalam memberikan dukungan baik berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan kepada pihak sekolah, komite sekolah menggunakan hasil rapat pleno maupun rapat pengurus komite sekolah. Dukungan finansial yang diberikan kepada sekolah dilakukan dengan melakukan kegiatan penggalan dana untuk menunjang kegiatan sekolah dan realisasi program sekolah. Selain itu, komite sekolah juga membantu proses penyediaan tenaga kependidikan seperti tenaga pengajar mata pelajaran atau kegiatan ekstrakurikuler yang belum tersedia. Realisasi dari peran ini, komite membantu pengadaan Laboratorium Komputer lengkap dengan tenaga pengajarnya, tenaga perpustakaan, dan tenaga administrasi yang lain. Berkenaan dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler melukis, menari, dan musik, pihak komite sekolah berkontribusi di dalam membantu mencari tenaga pengajar untuk memenuhi kegiatan ekstrakurikuler yang diprogramkan sekolah. Semua ini bisa diwujudkan, karena sejak awal, komite sekolah terlibat aktif dalam rapat penyusunan program sekolah maupun rapat penyusunan RAPBS.

Peranan Komite Sekolah dalam Memberikan Kontrol dalam Rangka Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pendidikan kepada Pihak Sekolah

Dalam rangka memberikan kontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak sekolah, komite sekolah secara rutin mengadakan pertemuan dengan pengurus dan pihak sekolah. Pada saat rapat tersebut pengurus komite sekolah senantiasa memberikan kontrol kepada sekolah mengenai pengelolaan sekolah secara transparan dan akuntabel.

Peran ini dilakukan dengan cara meminta kepada sekolah melaporkan secara berkala seluruh kegiatan sekolah, baik yang berkenaan dengan kegiatan pembelajaran maupun manajemen keuangan sekolah. Komite sekolah meminta kepala sekolah untuk mempublikasikan RAPBS di papan pengumuman agar bisa diketahui bersama oleh seluruh komponen sekolah dan sekaligus melaporkan secara resmi setiap tahun pada Rapat Pleno Anggota Komite Sekolah. Pelaporan secara transparan dan akuntabel dilakukan dengan cara memberikan laporan seluruh kegiatan sekolah yang telah dilakukan, termasuk prestasi yang telah dicapai oleh sekolah, baik itu prestasi akademis maupun non akademis. Dalam laporan tersebut disajikan pula secara lengkap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang bersumber dari komite sekolah. Pada rapat tersebut laporan disahkan oleh seluruh anggota komite melalui perwakilannya dengan dibuktikan dengan Berita Acara Pengesahan Laporan Keuangan.

Realisasi penggunaan dana, baik dana dari Komite, dana rutin dan dana dari pemerintah, selalu dikontrol. Selain meminta laporan keuangan, komite juga meminta laporan kegiatan sekolah. Komite sekolah selalu mengingatkan kepada sekolah apabila ada kejanggalan-kejanggalan di dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Peranan Komite Sekolah sebagai Mediator antara Pemerintah dan Masyarakat

Dalam rangka menjadi mediator antara pemerintah dan masyarakat, yang dilakukan komite sekolah adalah menyampaikan program-program pemerintah yang berhubungan dengan kegiatan sekolah kepada seluruh elemen sekolah. Program-program pemerintah tersebut misalnya adanya bantuan BOS bagi sekolah, pelaksanaan Ujian Nasional, dan berbagai bantuan dari pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

Peran sebagai mediator ini diwujudkan dalam bentuk penyampaian berbagai program pemerintah secara langsung pada rapat pleno tentang adanya bantuan BOS, bantuan *block grant*, berbagai hal tentang pelaksanaan ujian nasional.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dikemukakan di atas, maka berikut ini akan diberikan pembahasan sebagai berikut.

1. Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di sekolah, komite sekolah telah melakukan kerja sama dengan pihak sekolah dan dewan guru. Kerja sama tersebut dilakukan dengan baik. Bentuk kerja sama yang dilakukan oleh komite sekolah adalah mendukung penyusunan program sekolah dan sekaligus realisasi program tersebut kepada sekolah. Program kerja sekolah disusun bersama antara kepala sekolah, dewan guru (seluruh guru) dan komite sekolah. Komite sekolah memberikan perhatian terhadap kondisi sekolah. Bentuk dukungan yang lain adalah adanya peran serta komite sekolah dalam memberikan usulan dan saran (bentuk pikiran) berkenaan dengan upaya memberikan pelayanan khususnya kepada siswa dan kepada wali murid. Berdasarkan temuan tersebut, dukungan yang diberikan oleh komite sekolah terhadap peningkatan mutu pelayanan sudah dilakukan. Namun demikian, bentuk dukungan tersebut masih belum menyentuh secara substantive tentang apa sebenarnya yang dibutuhkan sekolah agar memiliki kemampuan melayani secara optimal. Komite sekolah belum banyak memfasilitasi sekolah dengan kegiatan-kegiatan pembinaan melalui kegiatan workshop ataupun seminar tentang bagaimana memberikan pelayanan yang baik kepada pengguna.
2. Dalam rangka memberikan pertimbangan kepada pihak sekolah, komite sekolah melaksanakan dengan cara bermusyawarah atau dalam bentuk Rapat Pengurus Komite Sekolah pada saat menyusun program sekolah atau RAPBS, atau Rapat Pleno Komite Sekolah. Pertimbangan juga diberikan kepada pihak sekolah ketika sekolah mendapat bantuan *block grant* pengadaan perpustakaan sekolah untuk peningkatan status sekolah berstandar Nasional. Komite sekolah memberikan pertimbangan kepada pihak sekolah akan perlunya dana pendamping bantuan *block grant* yang diberikan oleh pemerintah. Pemberian pertimbangan tersebut diberikan kepada sekolah dalam upaya memenuhi kebutuhan sekolah untuk meningkatkan status sekolah yang berstandar nasional. Komite sekolah juga memberikan pertimbangan kepada pihak sekolah (kepala sekolah dan semua guru) tentang peningkatan mutu pendidikan terutama proses belajar-mengajar kepada siswa, peran serta sekolah dalam mengikuti berbagai lomba matapelajaran, baik di tingkat kota maupun propinsi, dan lain-lain. Secara konkret pemberian pertimbangan kepada sekolah misalnya dalam rangka penyusunan program sekolah dan RAPBS, BOS buku dan rehabilitasi sekolah, pengadaan media pendidikan, program kegiatan sekolah, dan pengadaan alat dan pakaian drumband.
3. Dalam rangka memberikan arahan dan dukungan tenaga kepada pihak sekolah, komite sekolah mengarahkan kepada sekolah untuk menambah tenaga kependidikan sesuai yang diperlukan. Pemberian arahan ini dilakukan oleh komite sekolah pada saat melakukan rapat bersama guru dan kepala sekolah untuk membahas secara khusus mengenai program sekolah dan RAPBS. Arahan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah dalam hal ini kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang mutu pendidikan di sekolah, seperti pengadaan tenaga pengajar

komputer, tenaga pengajar melukis, tenaga pengajar menari, tenaga pengajar musik, tenaga pelatih drumband, dan lain-lain.

4. Dalam rangka memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana kepada pihak sekolah, pengurus komite sekolah bermusyawarah dengan seluruh anggota komite sekolah melalui Rapat Pleno Komite Sekolah untuk memberikan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan sekolah. Secara konkret, pemberian bantuan sarana dan prasarana ini berupa bantuan komputer, kursi, kipas angin, pengadaan laboratorium komputer dan bahasa, pengadaan media pembelajaran (TV, VCD, Laptop dan LCD), dan pengadaan alat-alat drumband.
5. Dalam memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijaksanaan pendidikan kepada pihak sekolah, keomite sekolah melakukan dengan cara melalui rapat pengurus komite sekolah dengan guru dan melalui rapat pleno dengan anggota komite. Secara konkret yang telah dilakukan komite sekolah dalam memberikan pertimbangan penentuan dan pelaksanaan kebijaksanaan pendidikan kepada pihak sekolah adalah dalam penentuan BOS buku, penentuan RAPBS, penentuan RAPBS, rapat pleno sekolah atau program kegiatan sekolah, dan penentuan usulan rehab bangunan sekolah.
6. Dalam memberikan dukungan baik berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan kepada pihak sekolah, komite sekolah menggunakan hasil rapat pleno maupun rapat pengurus komite sekolah. Secara konkret dukungan yang diberikan berupa peralatan media pembelajaran, peralatan komputer, peralatan drumband, peralatan sekolah yang lain, kegiatan proses belajar-mengajar (berupa pemikiran kepada guru untuk meningkatkan mutu pembelajaran), dan kegiatan tutup tahun. Dukungan finansial biasanya diwujudkan dalam bentuk bantuan dana dan barang yang diperlukan sekolah, dukungan pemikiran berupa pemberian pertimbangan, usulan dan masukan yang berguna bagi peningkatan mutu pendidikan di sekolah, dan dukungan tenaga berupa ikut serta anggota komite dalam kegiatan sekolah.
7. Dalam rangka memberikan kontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak sekolah, komite sekolah secara rutin mengadakan pertemuan dengan pengurus dan pihak sekolah. Pada saat rapat tersebut pengurus komite sekolah senantiasa memberikan kontrol kepada sekolah mengenai pengelolaan sekolah secara transparan dan akuntabel. Secara konkret, kegiatan ini dilakukan dengan cara meminta kepada sekolah melaporkan secara berkala mengenai seluruh kegiatan rutin pembelajaran maupun pembelanjaan sekolah. Sekolah juga memajangkan RAPBS di papan pengumuman untuk diketahui bersama oleh seluruh orang tua murid, sekaligus melaporkan secara resmi setiap tahun pada Rapat Pleno Anggota Komite Sekolah. Pelaksanaan penggunaan dana, baik dana Komite, dana rutin dan dana dari pemerintah selalu ada kontrol. Hasil kegiatan sekolah selalu disampaikan kepada komite.
8. Dalam rangka menjadi mediator antara pemerintah dan masyarakat, yang dilakukan komite sekolah adalah menyampaikan program-program pemerintah yang berhubungan dengan kegiatan sekolah kepada seluruh orang tua murid (anggota komite sekolah). Program-program pemerintah tersebut misalnya adanya bantuan BOS bagi sekolah, pelaksanaan Ujian Nasional, dan berbagai bantuan dari pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Secara konkret, kegiatan mediator ini diwujudkan dalam bentuk penyampaian berbagai program pemerintah secara langsung pada rapat pleno tentang adanya bantuan BOS, bantuan *block grant*, berbagai hal tentang pelaksanaan ujian nasional.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka berikut ini akan disampaikan simpulan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian sebagai berikut.

1. Peran komite sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di sekolah adalah dengan melakukan kerja sama dengan pihak sekolah. Bentuk kerja sama yang dilakukan komite sekolah antara lain adalah dengan memberikan dukungan kepada sekolah dalam penyusunan program dan sekaligus realisasinya. Selain itu, komite sekolah senantiasa memberikan dukungan moril kepada kepala sekolah dan guru dengan memberikan usulan dan saran (dalam bentuk pemikiran) tentang bagaimana memberikan pelayanan prima kepada setiap komponen sekolah.
2. Pemberian pertimbangan kepada pihak sekolah, dilakukan komite sekolah melalui kegiatan musyawarah atau dalam bentuk Rapat Pengurus Komite Sekolah. Pemberian pertimbangan ini dilakukan pada saat menyusun program sekolah atau RAPBS, atau Rapat Pleno Komite Sekolah. Selain itu, pertimbangan yang diberikan juga berkenaan dengan peningkatan mutu pendidikan terutama proses belajar-mengajar, peran serta sekolah dalam mengikuti berbagai lomba mata pelajaran, baik di tingkat kota maupun propinsi, implementasi BOS buku dan rehabilitasi sekolah, pengadaan media pendidikan, program kegiatan sekolah, dan pengadaan alat dan pakaian drumband.
3. Arahan dan dukungan tenaga kepada pihak sekolah, dilakukan komite sekolah dengan memberikan arahan untuk menambah tenaga pengajar maupun tenaga kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan.
4. Bantuan berupa sarana dan prasarana kepada pihak sekolah, diberikan oleh pengurus komite sekolah melalui kegiatan musyawarah terlebih dulu dengan seluruh anggota komite sekolah melalui Rapat Pleno Komite Sekolah. Pemberian bantuan sarana dan prasarana ini antara lain diwujudkan dalam bentuk peralatan pendukung penyelenggaraan pendidikan.
5. Pemberian pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijaksanaan pendidikan kepada pihak sekolah, komite sekolah melakukannya dengan cara melalui rapat pengurus komite sekolah dengan guru dan melalui rapat pleno dengan anggota komite. Pemberian pertimbangan penentuan dan pelaksanaan kebijaksanaan pendidikan kepada pihak sekolah ini direalisasikan dengan penentuan BOS buku, penentuan RAPBS, rapat pleno sekolah atau program kegiatan sekolah, dan penentuan usulan rehab bangunan sekolah.
6. Dukungan finansial diwujudkan dalam bentuk bantuan dana yang dilakukan melalui penggalian dana. Dukungan pemikiran berupa pemikiran tentang bagaimana meningkatkan mutu pembelajaran serta pemberian pertimbangan, usulan dan masukan yang berguna bagi peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Dukungan tenaga berupa keikutsertaan anggota komite dalam berbagai kegiatan di sekolah.
7. Kegiatan kontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak sekolah, komite sekolah secara berkala meminta laporan pertanggungjawaban baik dari kegiatan rutin pembelajaran dan juga pengelolaan keuangan sekolah. Komite meminta sekolah untuk transparan dalam berbagai hal dan melaporkannya secara rutin pada saat Rapat Pleno dengan meminta sekolah mempublikasikan RAPBS di papan pengumuman agar bisa diketahui oleh pihak terkait.
8. Dalam menjalankan perannya sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat, komite sekolah berperan aktif dalam menyampaikan program-program pemerintah yang berhubungan dengan kegiatan sekolah kepada seluruh orang tua murid.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diajukan saran-saran sebagai berikut.

1. Kepada para pengurus komite sekolah diharapkan untuk senantiasa aktif dan kreatif dalam memberdayakan sumber daya yang ada di sekolah maupun yang ada di masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

2. Kepada para kepala sekolah diharapkan mampu bekerja sama dengan komite sekolah agar dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah secara lebih optimal.
3. Kepada para guru hendaknya aktif berperan serta dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah dengan memanfaatkan peran komite sekolah secara maksimal.
4. Bagi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun hendaknya benar-benar memantau dan memberikan pembinaan kepada komite sekolah sesuai dengan kewenangannya agar komite lebih berdaya dalam membantu program pemerintah, khususnya dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid. 2006. *Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar Kompetensi Guru*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Agus Akhmadi. 2004. "Memberdayakan Komite Sekolah dan Partisipasi Masyarakat, Upaya Meningkatkan Keberhasilan Pendidikan" dimuat dalam *Jurnal Pendidikan Terakreditasi secara nasional*. Volume 10, Nomor 1, Juni 2004.
- Agus Budi Santoso. 2004. "Otonomi Pendidikan, Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan, dan Standardisasi Pendidikan." Dimuat dalam *Jurnal Pendidikan – terakreditasi Dikti – IKIP PGRI Madiun*, Vol. 10, No. 1, Juni 2004. Madiun: IKIP PGRI Madiun.
- Bogdan, Robert and Steven J. Taylor. 1975. *Introduction to Qualitative Research Methods*. New York: John Wiley and Sons.
- Bogdan, R.C. dan S.K. Biklen. 1982. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn & Bacon, Inc.
- Depdiknas. 2003. ***Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional***. Jakarta: Depdiknas.
- Draha Talizuduhu. 1990. *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Rineka Cipta
- Dwi Agus Sudjimat. 2004. "Optimalisasi Pemberdayaan Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu pendidikan". Makalah disampaikan dalam Konvensi Regional Gelombang II Komite Sekolah Se Jawa Timur yang diselenggarakan pada tanggal 28 Agustus 2004 di Aula Dinas P dan K Jawa Timur.
- Ki Supriyoko. 2004. "Problem Kultural Pendidikan Kita" dalam ***Kompas, Jumat 5 Maret 2004, halaman 4***.
- Lincoln, Yvonna S. & Egon G. Guba. 1985. *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills: Sage Publications.
- Marshall, C. and Gretchen B.R. 1995. *Designing Qualitative Research*. London: Sage Publication.
- Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. 1984. *Qualitative Data Analysis*. Beverly Hills: Sage Publication

- Managing Basic Education. 2003. "Manajemen Berbasis Sekolah". diakses dari <http://mbeproject.net/introduction.html> on-line 10 Februari 2005..
- Managing Basic Education. 2003. "Apakah Pembelajaran PAKEM itu?". diakses dari <http://mbeproject.net/mbe511.html> on-line 10 Februari 2005).
- Managing Basic Education. 2003. "Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah". diakses dari <http://mbeproject.net/mbs.html> on-line 10 Februari 2005).
- Mulyasa. 2002. *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Parji. 2004. "Otonomi Daerah dan Implikasinya dalam Dunia Pendidikan." Dimuat dalam Jurnal Pendidikan –terakreditasi Dikti – IKIP PGRI Madiun, Vol. 10, No. 1, Juni 2004. Madiun: IKIP PGRI Madiun.
- 2004. "Pemberdayaan Potensi Sekolah Melalui Perubahan Perilaku Pelaku Pendidikan." Dimuat dalam Jurnal Pendidikan –terakreditasi Dikti – IKIP PGRI Madiun, Vol. 10, No. 2, Desember 2004. Madiun: IKIP PGRI Madiun.
- Prabangkit, Didik. 2000. *Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Dasar*. Jakarta: Dirjen Dikdasmen Depdiknas
- Suyanto. 2003. "Optimalisasi Peran Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan" Disampaikan dalam Seminar Nasional Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan di Semarang 26 Februari 2003.
- Sutopo, H. B. 1988. *Persepsi dan Partisipasi Masyarakat pada Pelaksanaan Program Kegiatan Posyandu: Kasus Tiga Desa di Kabupaten Klaten Jawa Tengah*. Surakarta: UNS Press.
- _____, H. B. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Tilaar. 2000. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- "Prinsip MBS yang Baik Dilaksanakan Berbeda di Lapangan" dalam *Kompas, Kamis 11 Maret 2004, halaman 9*.